

MANAJEMEN KONFLIK DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH: MERESPON POLARISASI NETIZEN TERHADAP KEBIJAKAN KONTROVERSIAL DI MEDIA SOSIAL

Rahmatul Hidayat¹, Sarfan Tabo², Syaharuddin³

^{1,3} Universitas Pancasakti Makassar, Makassar

² Universitas Gorontalo, Gorontalo

attulahyadi86@gmail.com¹, sarfandjtabo@gmail.com², Syaharuddin007@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah ruang publik menjadi arena diskursus yang dinamis, namun di sisi lain sangat berpotensi memicu eskalasi konflik horizontal dan vertikal secara cepat. Kebijakan pemerintah yang dipandang kontroversial atau kurang sosialisasi sering kali direspons oleh warganet (netizen) melalui polarisasi opini yang tajam, yang mana proses ini secara langsung didorong oleh arsitektur algoritmik platform digital dan fenomena pembajakan emosional (emotional hijacking). Jurnal ilmiah ini secara komprehensif mengkaji urgensi rekalisasi dan dekonstruksi strategi manajemen konflik serta komunikasi krisis pemerintah dalam memitigasi polarisasi digital tersebut. Melalui pendekatan tinjauan analitis interdisipliner dan sintesis studi kasus kontroversi kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, kajian ini menjadikan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) sebagai kerangka pembedah utama. Hasil telaah memperlihatkan bahwa pendekatan legalistik-represif murni dan gaya komunikasi kehumasan yang defensif (seperti strategi Denial) tidak lagi efektif, melainkan justru memperburuk polarisasi afektif dan mendelegitimasi otoritas institusi negara. Sebaliknya, institusi pemerintah dituntut untuk senantiasa menjaga kejelasan pesan, mengoptimalkan instrumen komunikasi dua arah, dan terus memantau dinamika aspirasi guna meredam disinformasi di ruang publik. Sebagai kesimpulan, artikel ini mendesak pengadopsian paradigma Digital Crisis Governance (Tata Kelola Krisis Digital) yang berpijak pada implementasi strategi komunikasi.

Kata Kunci: **Manajemen Konflik; Komunikasi Pemerintah; Polarisasi Netizen; Media Sosial; Situational Crisis Communication Theory (SCCT); Tata Kelola Krisis Digital**

ABSTRACT

The rapid development of information technology and social media has transformed the public sphere into a dynamic arena of discourse. However, it has also significantly increased the potential for the rapid escalation of both horizontal and vertical conflicts. Government policies perceived as controversial or inadequately socialized are often met with sharp opinion polarization among netizens. This process is further intensified by the algorithmic architecture of digital platforms and the phenomenon of emotional hijacking. This scientific article comprehensively examines the urgency of recalibrating and deconstructing government conflict management strategies and crisis communication approaches in order to mitigate such digital polarization. Through an interdisciplinary analytical review approach and the synthesis of case studies involving policy controversies at both national and local levels, this study employs the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) as the primary analytical framework. The findings indicate that purely legalistic-repressive approaches and defensive public relations

communication styles (such as denial strategies) are no longer effective. Instead, these approaches tend to exacerbate affective polarization and undermine the legitimacy of state institutions. Conversely, government institutions are required to maintain clarity of messaging, optimize two-way communication mechanisms, and continuously monitor public aspirations to reduce the spread of misinformation in the digital public sphere. In conclusion, this article calls for the adoption of a Digital Crisis Governance paradigm grounded in the implementation of adaptive, transparent, and participatory communication strategies to effectively manage conflicts and crises in the digital era.

Keywords: *Conflict Management; Government Communication; Netizen Polarization; Social Media; Situational Crisis Communication Theory (SCCT); Digital Crisis Governance.*

PENDAHULUAN

Dinamika interaksi antara negara dan warga negara telah mengalami transformasi fundamental dan struktural sejak kemunculan teknologi informasi dan media sosial. Ruang digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai saluran distribusi informasi yang bersifat satu arah atau etalase kebijakan pemerintah, melainkan telah berevolusi menjadi arena deliberatif sekaligus ruang kontestasi politik yang sangat kompleks, dinamis, dan berpotensi konfliktual. Di satu sisi, media digital menawarkan janji luhur berupa demokratisasi informasi, di mana partisipasi publik dapat ditingkatkan, akses terhadap wacana politik dipermudah, dan transparansi pemerintah dapat diawasi secara langsung oleh elemen masyarakat dari berbagai lapisan (Judijanto et al., 2026). Namun, pada spektrum yang berseberangan, arsitektur sosio-teknis dari platform media sosial, yang sangat bergantung pada algoritma personalisasi dan moderasi konten otomatis, telah menciptakan kerentanan struktural yang memicu segregasi sosial, eskalasi ujaran kebencian, penyebaran disinformasi, dan polarisasi opini publik yang sangat tajam (Aripai & Hilmiyah, 2025).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan kontemporer, konstelasi fenomena ini menghadirkan tantangan manajemen krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan publik yang bersifat kontroversial, sensitif secara kultural, atau memiliki dampak asimetris terhadap berbagai kelompok demografis dengan cepat memicu reaksi berantai di media sosial (Risnanda et al., 2025). Ketika sentimen publik terakumulasi, krisis komunikasi menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh otoritas. Masyarakat, yang merasa dirugikan, diabaikan, atau tidak dilibatkan secara partisipatif, secara otomatis menuntut pertanggungjawaban, transparansi, keadilan prosedural, dan respons cepat dari pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi. Kegagalan birokrasi pemerintah dalam memitigasi dan mengelola konflik komunikasi ini tidak hanya mengorbankan reputasi institusi dan citra kepemimpinan, tetapi juga berpotensi menggerus legitimasi politik dan mengancam kohesi sosial kemasyarakatan secara keseluruhan (Juditha, 2025). Oleh karena itu, kerangka kerja manajemen konflik sosial

dan strategi komunikasi krisis tidak lagi dapat dioperasikan dalam paradigma kehumasan tradisional yang reaktif, melainkan harus didekonstruksi dan diintegrasikan ke dalam sebuah ekosistem digital crisis governance (tata kelola krisis digital) yang bersifat adaptif, proaktif, empatik, dan sangat partisipatif (Mahardika et al., 2025).

Memahami polarisasi opini terkait kebijakan pemerintah mengharuskan kita untuk membongkar akar sosiologis dan arsitektur algoritmik dari platform tempat diskursus itu terjadi. Polarisasi sosial di era media sosial bukan sekadar manifestasi dari perbedaan pendapat politik yang wajar dalam sebuah negara demokrasi, melainkan cerminan dari dinamika struktur sosial yang jauh lebih kompleks, yang melibatkan interaksi antarindividu, benturan kelas, sentimen identitas, yang kesemuanya diperkuat secara eksponensial oleh intervensi teknologi digital (Hidayat et al., 2025). Secara epistemologis dan sosiologis, konflik didefinisikan sebagai bagian yang inheren dan tidak terhindarkan dari interaksi antarindividu maupun antarkelompok dalam suatu organisasi atau entitas masyarakat, yang mencerminkan adanya ketidakcocokan nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Lebih dari itu, konflik memiliki potensi ambivalen: ia bisa menjadi instrumen kehancuran sosial yang merusak, namun di saat yang bersamaan, ia menyimpan daya dorong untuk kreativitas, perbaikan kebijakan, dan perubahan sosial fungsional yang progresif apabila dikelola melalui strategi yang rasional (Wahid & Martianto, 2026). Namun, ketika konflik struktural dan benturan nilai ini ditransplantasikan ke dalam infrastruktur media sosial, terjadi distorsi dan amplifikasi yang mengubah bentuk diskursus publik menjadi arena pertempuran afektif (Aliyamsyah Siregar et al., 2025).

Penyebab utama dari distorsi ini terletak pada model bisnis dan arsitektur algoritma media sosial itu sendiri. Algoritma didesain semata-mata untuk memaksimalkan waktu singgah dan retensi pengguna (user engagement) melalui mekanisme umpan balik yang sering kali mengeksploitasi kerentanan kognitif dan respons emosional manusia. Kondisi ini secara akademis diidentifikasi sebagai fenomena pembajakan emosional (emotional hijacking). Konten-konten yang memicu kemarahan komunal, ketakutan irasional, kepanikan moral, atau antagonisme partisan memiliki probabilitas algoritmik yang jauh lebih tinggi untuk diamplifikasi, direkomendasikan, dan disebarluaskan dibandingkan dengan konten yang rasional, moderat, dan berbasis fakta objektif (Solihin et al., 2025). Infrastruktur teknis ini secara sistematis melahirkan fenomena echo chambers (ruang gema) dan filter bubbles (gelembung penyaring), di mana pengguna internet secara terus-menerus dan terisolasi hanya terpapar pada narasi-narasi yang memvalidasi dan memperkuat keyakinan ideologis mereka sebelumnya (confirmation bias). Dalam ruang gema ini, setiap paparan terhadap opini yang berseberangan, termasuk klarifikasi resmi dari pemerintah, sering kali ditafsirkan sebagai serangan, konspirasi, atau disinformasi, yang membuat pengguna semakin enggan membuka diri terhadap dialog konstruktif (Amiruddin et al., 2022).

Lebih jauh lagi, kristalisasi dari paparan algoritmik ini adalah fenomena polarisasi afektif (*affective polarization*). Polarisasi afektif merujuk pada level animositas, kebencian personal, stereotip negatif, dan ketidakpercayaan yang mendalam yang dirasakan oleh individu atau suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berseberangan secara ideologis maupun afeksi politik (Rahman, 2025). Dalam konteks penerapan kebijakan pemerintah yang kontroversial, polarisasi afektif secara radikal mengubah esensi perdebatan. Setiap perdebatan teknis atau administratif (misalnya, terkait infrastruktur, layanan publik, atau alokasi anggaran) tereduksi dan berubah wujud menjadi sebuah proxy war identitas. Keterbelahan masyarakat netizen tidak lagi didasarkan pada analisis substansi atau analisis dampak dari kebijakan tersebut, melainkan didikte oleh identitas politik partisan pro-pemerintah dan anti-pemerintah. Hal ini sangat nyata dalam lanskap politik Indonesia yang memperlihatkan segregasi tajam di dunia maya yang mengakar dari narasi elektoral masa lalu, di mana isu-isu lokal, ekonomi, budaya, dan agama dengan cepat ditarik ke dalam bingkai polarisasi makro (Sumartias et al., 2026).

Dampak lanjutan dan paling destruktif dari polarisasi afektif yang dibiarkan tanpa manajemen konflik yang memadai adalah munculnya minoritisasi, marginalisasi, dan praktik swasensor (*self-censorship*) di ruang publik digital. Algoritma media sosial yang memperkuat ujaran kebencian dan konten provokatif tidak jarang menargetkan kelompok minoritas, kelompok rentan, atau pihak-pihak yang tidak memiliki kapital politik yang kuat. Sebagai representasi dari fenomena ini, studi mengenai kebebasan berpendapat kelompok minoritas agama di platform seperti TikTok dan media sosial lainnya mengonfirmasi bahwa ekosistem digital sering kali mempersempit ruang aman mereka. Polarisasi opini publik terwujud dalam bentuk stereotip negatif dan penguatan narasi yang mengaitkan identitas agama dengan isu politik, menciptakan lingkungan diskriminatif berupa pelabelan stigmatik dan tekanan sosial yang masif. Kondisi ini menyebabkan pengguna dari kelompok minoritas mengalami ketakutan berekspresi secara sosiopsikologis, yang berujung pada keengganan absolut untuk membahas isu publik atau keagamaan karena ancaman perundungan siber (*cyberbullying*). Realitas empiris ini membantah keras asumsi utopian bahwa media sosial secara otomatis berfungsi sebagai ruang demokratis yang egaliter. Sebaliknya, ekosistem digital berpotensi kuat untuk mencederai kebebasan berekspresi, memperkuat intoleransi, dan membungkam suara-suara alternatif apabila tidak diimbangi dengan strategi manajemen konflik yang presisi dan regulasi perlindungan literasi digital yang komprehensif. Oleh sebab itu, klaim atau komunikasi krisis apa pun yang diluncurkan oleh institusi pemerintah tidak akan menemukan pijakan efektivitasnya apabila hanya menysasar pada membenaran logika hukum atau teknis kebijakan semata, tanpa meredam dan membedah animositas afektif yang telah terstruktur secara sosiologis dan algoritmik (Achfandhy et al., 2023).

Selain itu, dinamika mikro dalam komunitas digital seperti grup WhatsApp juga memberikan wawasan tentang bagaimana konflik tereskalasi dalam kelompok-kelompok yang lebih intim. Studi mengenai Generasi Z menunjukkan bahwa dalam menghadapi konflik terkait misinformasi atau perbedaan pandangan, anggota komunitas terpecah menjadi kelompok liberal (yang membiarkan), kelompok proaktif dan reaktif (yang merespons, menengahi, atau memberi umpan balik), dan kelompok pembaca pasif. Manajemen konflik organik yang terjadi di dalam ruang-ruang privat ini, seperti memposting humor untuk menghibur, menegur pelaku, atau menengahi pertikaian, menegaskan bahwa resistensi terhadap polarisasi sebenarnya eksis di masyarakat, namun membutuhkan katalisator komunikasi yang selaras dari pihak otoritas yang lebih tinggi. Mengabaikan struktur komunikasi mikro ini berarti kehilangan peluang besar bagi pemerintah untuk memanfaatkan agen-agen rekonsiliasi organik di tengah pusaran krisis. Paradigma Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dalam Konteks Tata Kelola Pemerintahan (Irawanto et al., 2024).

Untuk menavigasi turbulensi dan membedah arsitektur komunikasi krisis yang menyertai kebijakan kontroversial, diperlukan sebuah kerangka analitis yang kokoh dan teruji secara empiris. Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang digagas oleh W. Timothy Coombs menyediakan instrumen konseptual yang sangat presisi untuk mengevaluasi dan merancang respons pemerintah. Berangkat dari fondasi teori atribusi dalam psikologi sosial, SCCT mempostulatkan premis bahwa manusia, sebagai evaluator peristiwa, memiliki kecenderungan kognitif yang natural untuk secara terus-menerus mencari penyebab fundamental dari suatu kejadian krisis yang mengganggu stabilitas hidup mereka. Setelah penyebab tersebut dirasionalisasi, publik secara kolektif akan mengatribusikan tingkat tanggung jawab (attribution of crisis responsibility) kepada aktor, organisasi, atau institusi spesifik yang dianggap paling berwenang (Setiawan et al., 2024).

Dalam lanskap pelayanan publik dan kenegaraan, institusi pemerintah memikul beban ekspektasi yang sangat berat. Ketika terjadi kegagalan sistem, bencana berskala besar, kebocoran data, atau penerapan kebijakan yang memicu keresahan, masyarakat secara otomatis dan rasional menempatkan pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang seharusnya mampu mengantisipasi, mencegah, atau memitigasi krisis tersebut. Karena posisi hierarkis ini, atribusi tanggung jawab publik terhadap pemerintah sering kali berada pada tingkat yang maksimal. Berdasarkan spektrum atribusi tanggung jawab ini, SCCT mengklasifikasikan krisis ke dalam berbagai klaster utama dan merekomendasikan strategi respons komunikasi yang harus diselaraskan secara presisi dengan tingkat kemarahan publik, demi tujuan fundamental: memastikan keselamatan warga, memitigasi kerusakan reputasi institusi, dan pada akhirnya memulihkan kepercayaan publik (public trust).

Strategi komunikasi krisis dalam SCCT terbentang dalam sebuah spektrum yang berkisar dari pendekatan defensif yang menyangkal keterlibatan, hingga pendekatan akomodatif yang menerima beban kesalahan secara penuh. Pendekatan tersebut dikategorisasikan sebagai berikut:

1. Denial (Penyangkalan): Upaya absolut organisasi untuk membantah keterlibatannya dalam krisis, menyangkal bahwa krisis benar-benar terjadi, atau menggunakan strategi scapegoating (mencari kambing hitam) dengan menyalahkan aktor eksternal atau pihak ketiga.
2. Diminish (Pengurangan/Pengecilan): Strategi yang berupaya meminimalisasi persepsi publik terhadap tingkat keparahan krisis yang terjadi, atau memberikan justifikasi bahwa insiden tersebut diakibatkan oleh alasan ketidaksengajaan teknis atau faktor-faktor di luar kendali wajar organisasi.
3. Rebuild (Pembangunan Kembali): Pendekatan yang sepenuhnya akomodatif, ditandai dengan penerimaan tanggung jawab penuh atas insiden, penyampaian permintaan maaf secara terbuka dan tulus, pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan, serta komitmen transparansi untuk melakukan koreksi sistemik guna mencegah keberulangan di masa depan.
4. Bolstering (Penguatan): Merupakan strategi pelengkap (suplemen) yang tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan strategi lain. Tujuannya adalah untuk mengingatkan publik pada rekam jejak positif institusi di masa lalu, mempublikasikan prestasi-prestasi yang telah diraih, atau mengapresiasi pihak-pihak internal dan eksternal yang telah mendedikasikan diri dalam proses penanganan krisis.

Kajian literatur yang komprehensif mengindikasikan bahwa kesalahan fundamental dan paling merusak yang sering dilakukan oleh pemerintah maupun institusi besar adalah ketidaksesuaian (mismatch) dalam memilih strategi komunikasi. Kesalahan paling klasik adalah mengimplementasikan strategi Denial atau Scapegoating manakala publik telah dengan tegas memposisikan insiden tersebut ke dalam klaster krisis yang dapat dicegah (Preventable Crisis cluster), seperti kasus korupsi, kebocoran data akibat mismanajemen arsitektur siber, atau peluncuran kebijakan diskriminatif tanpa studi publik. Ketika pemerintah menerapkan gaya komunikasi defensif yang berkelit dalam krisis yang diyakini secara rasional bersumber dari kelalaian prosedural, skeptisisme publik akan tereskalasi menjadi permusuhan terbuka. Teori penentuan agenda (agenda-setting theory) dalam komunikasi massa menunjukkan bahwa kegagalan otoritas dalam mengambil alih dan mengendalikan narasi secara jujur pada fase inkubasi krisis akan menciptakan sebuah ruang vakum informasi.

Di era media sosial, ruang vakum ini tidak akan bertahan lama; ia dengan sangat cepat dan agresif akan diisi oleh wacana tandingan (counter-narratives) yang didistribusikan oleh netizen kritis. Narasi-narasi oposisional ini sering kali dikapitalisasi dan diamplifikasi lebih lanjut oleh aktor-aktor politik elektoral, komplotan buzzer, hingga penyebar misinformasi profesional yang melihat krisis ini sebagai momentum emas untuk

memperkeruh polarisasi demi keuntungan elektoral atau ekonomi. Bukti empiris dari berbagai studi manajemen reputasi mengonfirmasi bahwa respons komunikasi yang bersifat defensif justru melipatgandakan kecurigaan publik dan merusak kredibilitas secara eksponensial dalam ekosistem digital yang hiper-transparan.

Dalam lingkungan di mana opini massa digerakkan oleh viralitas sentimen yang bergulir dalam hitungan menit, strategi Rebuild yang disokong dengan strategi Bolstering terbukti secara empiris dan teoretis sebagai instrumen tata kelola yang paling rasional, etis, dan efektif untuk meredam eskalasi kemarahan netizen. Evaluasi terhadap komitmen institusi untuk memperbaiki sistem dan kesediaan untuk menyampaikan permintaan maaf secara institusional tidak lagi dipandang oleh masyarakat modern sebagai bentuk kelemahan otoritas atau inkompetensi negara. Sebaliknya, langkah akomodatif tersebut diterjemahkan sebagai wujud dari empati strategis (*strategic empathy*) dan transparansi adaptif yang justru memanusiakan birokrasi, meredakan ketegangan sosiopolitik, dan pada gilirannya merekonstruksi serta memperkuat pilar legitimasi politik dalam jangka panjang.

Hegemoni Kultural dan Sengketa Infrastruktur: Mikrokosmos Polarisasi di Sulawesi Selatan (Kasus Kabupaten Gowa) . Dinamika pemerintahan lokal sering kali berevolusi menjadi mikrokosmos yang secara akurat merefleksikan arsitektur polarisasi berskala nasional, terutama ketika rancangan regulasi publik dan kebijakan pembangunan fisik mulai bersinggungan secara agresif dengan klaim hak atas tanah, sejarah leluhur, dan identitas kultural masyarakat adat. Di wilayah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, polemik ekstensif yang menyelubungi pembangunan proyek infrastruktur nasional Bendungan Jenelata, serta kontroversi pengesahan kelembagaan adat daerah, telah mencetak preseden krisis tata kelola yang sangat signifikan dalam studi manajemen konflik.

Pada kasus proyek strategis pembangunan Bendungan Jenelata, benih konflik komunal mencuat berakar dari rasa ketidakadilan atas skema tuntutan ganti rugi pembebasan lahan oleh warga terdampak. Aspirasi ini pada awalnya diartikulasikan melalui saluran protes fisik konvensional, namun dengan cepat bergeser dan mengalami amplifikasi luar biasa ketika dikanalisasi ke dalam platform media digital. Tuntutan fundamental akan transparansi pembayaran ganti rugi dari masyarakat menandakan adanya asimetri informasi dan jurang komunikasi (*communication gap*) yang serius antara badan pelaksana pembangunan, pemerintah daerah, dan entitas warga lokal. Ketika konflik agraria struktural ini diunggah ke etalase media sosial, sentimen solidaritas netizen tidak serta merta tunggal. Wacana yang terbentuk justru terbelah ke dalam dua kutub polarisasi yang saling berhadapan: di satu sisi, terdapat kelompok utilitarian yang mengadvokasi narasi kemajuan modernisasi infrastruktur demi ketahanan sumber daya

air, sementara di sisi lain berdiri aliansi aktivis digital dan simpatisan akar rumput yang menggugat perampasan hak atas ruang hidup dan keadilan agraria.

Dalam situasi konflik yang berlapis ini, metode penyebaran informasi satu arah (one-way broadcasting) menggunakan siaran pers standar tidak lagi memadai dan bahkan sering dianggap manipulatif. Pengelolaan resolusi sengketa agraria semacam ini mensyaratkan intervensi komunikasi dialogis yang bersifat kolaboratif dan melibatkan instrumen lintas sektor. Implementasi resolusi ini meniscayakan peran tokoh sentral, tokoh agama, atau tokoh masyarakat lokal untuk diaktivasi sebagai agen fasilitator mediasi—sering diistilahkan sebagai hakam dalam resolusi keadilan kultural—guna menjembatani kebuntuan (deadlock) komunikasi, karena tokoh-tokoh ini memiliki modal legitimasi sosiologis yang tidak dimiliki oleh narator birokrasi murni.

Di sisi lain, dimensi kontroversi yang mengelilingi Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Adat Daerah (LAD) di Kabupaten Gowa menyajikan anatomi krisis yang sama sekali berbeda. Kasus ini mempertontonkan realitas empiris bagaimana intervensi regulasi tata kelola yang menyentuh ranah simbolik dan merestrukturisasi narasi historis masa lalu mampu memantik krisis identitas yang tajam dan emosional. Revisi legislasi krusial yang mendudukkan posisi politis Bupati selaku Ketua eks-officio LAD—yang menurut interpretasi sebagian pihak mengemban fungsi menyerupai peran sakral Somba atau raja adat—merusak ekuilibrium tatanan nilai-nilai keraton konvensional yang secara eksklusif menempatkan tampuk kepemimpinan pada keabsahan garis keturunan silsilah bangsawan. Begitu wacana ini memasuki ekosistem media sosial, isu tersebut tidak hanya direduksi menjadi sengketa yurisdiksi tata usaha negara.

Netizen secara sistematis membingkai (framing) regulasi ini sebagai bentuk manuver politik hegemonik untuk mengkooptasi entitas kebudayaan tradisional demi memusatkan kekuasaan. Polarisasi opini yang terbentuk bertumpu kuat di atas sentimen emosional primordialisme kedaerahan. Terjadi benturan naratif frontal di mana kelompok royalis dan loyalis aristokrasi tradisional yang mempertahankan puritanisme adat berhadapan-hadapan dengan kelompok progresif rasional yang mendukung rasionalisasi reformasi institusi kebudayaan lokal di bawah payung pemerintahan daerah. Merujuk pada kerangka teori SCCT, krisis kultural yang mengeskalasi polarisasi ini dengan jelas diklasifikasikan sebagai preventable crisis (krisis yang sejatinya dapat dicegah). Resistensi awal yang timbul di ruang maya semestinya dapat dimitigasi secara substansial jika instrumen pemerintah lokal menginisiasi pendekatan riset opini, etnografi digital, dan pendengaran deliberatif sebelum tahapan legislasi dirampungkan. Terjadinya penolakan terbuka hingga eskalasi perseteruan menegaskan postulat bahwa rasionalitas tata kelola birokrasi sering kali mengalami defisiensi dalam menghitung determinan sentimen kultural yang notabene memiliki resonansi afektif luar biasa di jagat maya.

METODE PENELITIAN

Metode analisis konten kualitatif, yang dalam aplikasinya di ekosistem internet sering dirujuk sebagai analisis deduktif terarah (directed content analysis) atau Etnografi Analisis Konten, mengambil pijakan pada pembedahan struktural atas narasi-narasi mikro yang disemaikan ke dalam kanvas digital. Berbanding terbalik secara asimtotik dengan desain konten kuantitatif yang membeku pada determinasi frekuensi kemunculan kata, arsitektur metode kualitatif ini mengkhususkan diri pada eksplorasi pola-pola naratif, tema ideologis tersembunyi, dan ekstraksi makna kontekstual yang membungkus sebuah wacana. Instrumen analisis ini sangat lekat dengan konstruksi Teori Komunikasi klasik milik Harold D. Lasswell, yang memandu peneliti pemerintah untuk melakukan pengkodean (coding) data berlapis berdasarkan kaidah elementer: Who (menyelidiki autentisitas siapa sesungguhnya komunikator tersebut, apakah ia warga asli, bot, atau influencer politik), Says What (menganalisis bangunan isi pesan, metafora, dan bias yang digunakan), In Which Channel (mengobservasi karakter algoritma platform yang digunakan), To Whom (mengidentifikasi target demografis audiens), dan With What Effect (menilai implikasi emosional atau afektif yang dihasilkan di masyarakat).

Penerapan sistematis metode analisis ini membongkar premis bahwa media sosial tidak sekadar bertindak sebagai proyektor pasif representasi opini, melainkan telah menjelma menjadi ruang konstruksi deliberatif yang vital. Sebagai contoh, dalam interaksi terkait layanan dasar administrasi, analisis ini tidak hanya mencatat seberapa banyak komentar pujian atau kecaman yang bersarang di akun resmi kementerian, melainkan juga menelusuri bagaimana rentetan struktur pesan itu dibingkai, bagaimana kekecewaan atas pengabaian diartikulasikan, dan bagaimana otoritas meresponsnya. Fakta riset menunjukkan kesimpulan yang presisi: kohesi dan tingkat kepuasan konstituen linear dengan pengalaman subjektif keterlibatan. Warga internet yang interaksinya dengan otoritas negara dikacangkan atau diabaikan sama sekali sering mengekspresikan penolakan emosional secara terbuka, yang dengan cepat termutasi melalui efek viralitas digital, sehingga dalam sekejap menghancurkan legitimasi yang mungkin telah dibangun puluhan tahun (Hasibuan et al., 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hegemoni Kultural dan Sengketa Infrastruktur: Mikrokosmos Polarisasi di Sulawesi Selatan (Kasus Kabupaten Gowa)

Secara konvensional dan historis, desain kelembagaan negara dan birokrasi pemerintahan sering kali secara refleksif berlindung di balik pendekatan legalistik-formalistis yang sangat kaku dalam merespons hantaman kritik dan gelombang polarisasi netizen. Di lingkungan di mana keamanan dianggap sebagai stabilitas tanpa riak, terdapat godaan pragmatis yang sangat tinggi dari pihak aparaturnya untuk "memotong kompas" memecahkan resolusi konflik murni dan semata-mata dengan mengayunkan palu

instrumen hukum positif. Pendekatan represif ini diimplementasikan secara dominan melalui mobilisasi pasal-pasal dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang difungsikan untuk mendisiplinkan, menertibkan, atau membungkam individu serta entitas komunal yang dituduh mengarsiteki provokasi massal atau menyemai agitasi horizontal di mimbar media social (Abdullah, 2024).

Meskipun instrumen penegakan hukum dalam dosis tertentu merupakan doktrin deterrence (efek kejut dan pencegahan) yang sah untuk meredam kekacauan radikal horizontal, pendekatan yang membabi buta dan mengabsolutkan kacamata yudikatif terbukti tidak mampu dan gagal total dalam misi fundamentalnya: merekonstruksi jembatan trust (kepercayaan) batiniah masyarakat terhadap pemerintahannya sendiri. Ketika jerat delik hukum dipaksakan sebagai instrumen determinan tunggal untuk memadamkan pusaran krisis tanpa diiringi ikhtiar komunikasi inklusif yang persuasif, negara kemungkinan besar dapat mencapai apa yang disebut "pemulihan keamanan administratif", namun dipastikan menderita kepailitan total dalam pencapaian "pemulihan kohesi sosial".

Di hadapan opini publik netizen, defenisi ideal dari keadilan tidak semata direduksi menjadi hitam-putih penegakan undang-undang tertulis, namun membutuhkan hadirnya hak keterlibatan, pengakuan eksistensial untuk didengar aspirasinya, serta dialektika perdebatan terbuka yang egaliter. Kekosongan buku panduan moderasi komunikasi yang humanis dan nir-otoriter menjadikan penerapan sanksi hukum sering kali diejawantahkan oleh kaum marginal virtual sebagai ancaman represi kediktatoran digital terhadap kebebasan kemerdekaan berekspresi. Ironi yang menyakitkan adalah, langkah pendisiplinan ini pada akhirnya menjadi bumerang katalisator: ia tidak memusnahkan perlawanan, melainkan mengescalasi serta memperdalam sumur polarisasi dan kebencian terhadap otoritas itu sendiri (Aldi, 2023).

Menyikapi eskalasi klaster preventable crisis (krisis yang mestinya sanggup ditangkal sejak fajar), ketergantungan pemerintah pada tameng birokratis atau justifikasi administratif dalam tujuan taktis menunda-nunda realisasi pelunasan tuntutan publik hanya akan mencetak stempel arogansi kekuasaan yang sangat sulit dihapus. Konstruksi kerangka adaptasi kehumasan dari birokrasi pemerintahan di zaman disrupsi algoritma hiper-koneksi dengan demikian harus bertumpu pada arsitektur baru yang berjudul Digital Crisis Governance (Tata Kelola Krisis Digital yang Terpadu).

Filosofi tata kelola krisis hibrida ini bukanlah entitas departemen yang berdiri independen, melainkan sebuah proses rekayasa integratif yang mensyaratkan amalgamasi organisasional dari tiga elemen asasi kehumasan: transparansi yang dikalibrasi secara dinamis sesuai skala konteks krisis, penanaman jiwa empati strategis yang ditunjukkan dengan kesediaan mengadopsi bahasa warga yang terdampak, serta orkestrasi kolaborasi silang batas dengan kekuatan pilar civil society, kaum pemengaruh berskala mikro hingga

makro (influencers), serta poros pemimpin komunitas informal, demi menancapkan kembali fondasi legitimasi institusi dan mendamaikan faksi yang terpolarisasi secara komprehensif (Aripai & Hilmiyah, 2025).

Transformasi Ekosistem Sosial: Membangun Imunitas Kewargaan Melalui Literasi Digital

Studi mengenai polarisasi yang lahir di habitat digital menginjektikan sebuah pencerahan tajam kepada entitas pemerintahan kontemporer: bahwa mitigasi gempuran krisis tidak pernah bisa bergantung dan diserahkan semata-mata kepada instrumen modifikasi teknis perangkat humas internal kementerian maupun provinsi. Lingkungan ekologi informasi yang secara kronis terinfeksi dan tertular oleh wabah disinformasi terstruktur, polarisasi sentimen partisan afektif berskala tinggi, dan kubu-kubu absolut dari ruang echo chambers, mendesak dirumuskannya formula obat penyembuhan yang harus diinokulasikan langsung ke lapisan paling mendasar dari jaringan saraf publik, yakni di tingkat masyarakat sipil dan pranata akar rumput. Di atas altar realitas inilah, pembangunan imunitas agensi dan keuletan nalar kewargaan menuntut dikedepankannya pengarusutamaan literasi media fungsional, berdampingan dengan pematangan literasi politik yang tajam, sebagai syarat dogma yang esensial, tidak dapat dinegosiasikan, dan mutlak (*sine qua non*) dalam penyelenggaraan tata manajemen konflik yang bernapaskan daya tahan kontinuitas (Judijanto et al., 2026).

Konstruksi filsafat mengenai Good Public Governance (Tata Kelola Pemerintahan Publik yang Adil) berpijak tegak pada lima tiang keabadian: akuntabilitas yang tidak kenal kompromi, kejernihan transparansi yang dipertanggungjawabkan, independensi struktur pengawasan, implementasi keadilan nondiskriminatif, dan etika pertanggungjawaban nurani. Jikalau substansi dari pilar-pilar agung ini eksis semata-mata di dalam dokumen lembaran konstitusi atau sekadar dibekukan sebagai kerangka formalitas regulasi administratif, sementara di saat bersamaan dikomunikasikan ke ranah sosial menggunakan bahasa yang sumbang, elitis, dan miskin empati digital, maka yang timbul adalah terbukanya patahan celah besar bagi peretas opini, anasir oposisi klandestin, serta legiun pabrik pengerah buzzer ekonomi digital komersial untuk menancapkan pengaruh distorsinya.

Pada titik kulminasi di mana elite-elite makelar politik mengokupasi ruang-ruang cacat komunikasi untuk mementaskan teater populis atau strategi provokasi "playing the victim", persepsi murni rakyat terhadap desain orisinal kebijakan pemerintah dirusak secara terstruktur. Sebagai akibatnya, segmen masyarakat yang belum tercahkan oleh pemahaman literasi politik akan dengan gampang terseret masuk menyusuri pusaran lubang hitam dari spiral pertikaian emosi afektif tanpa ujung yang mengamputasi nalar jernih dan stabilitas sosial secara destruktif (Risnanda et al., 2025).

Mengacu pada tantangan sosiopolitik ini, perumusan peta jalan dari arsitektur manajemen resolusi konflik yang dikendalikan oleh orientasi makro tidak diizinkan untuk tereduksi dan berhenti secara mekanis hanya pada pemenuhan matriks-metriks skenario Situational Crisis Communication Theory (SCCT) oleh biro humas kementerian. Paradigma strategis tersebut justru wajib dibentangkan, diekspansi secara holistik, serta diformulasikan untuk menstimulasi penciptaan pemberdayaan kapasitas agensi rasional intelektual di kalangan netizen. Penguasaan atas literasi di arena media digital dengan sendirinya berubah derajat fungsi menjadi salah satu senapan pamungkas dalam persenjataan strategi manajemen pencegahan mitigasi konflik perintis (preventive conflict management strategy).

Target hakiki dan objektif esensial dari instrumen literasi ini sama sekali bukanlah melenyapkan perdebatan, melainkan menempa dan membangkitkan struktur sosial kemasyarakatan madani (civil society) di abad disrupsi yang sanggup berdiri imun dan kebal menghadapi serangan meriam provokasi fabrikasi hoaks, memiliki kapabilitas filter analisis kritis dalam mencerna lalu-lintas serbuan distribusi informasi yang hiperaktif, serta menjunjung tinggi pilar pluralitas demi toleransi keberagaman preferensi sudut pandang ideologis pada saat belenggu tirani desain algoritma terbukti cacat serta sarat muatan bias partikular komersial (Juditha, 2025).

Integrasi kurikulum penanaman edukasi pemahaman literasi intelektual di lingkungan virtual ini sama sekali dilarang untuk direduksi menjadi alat indoktrinasi represi. Penghapusan absolut percikan polarisasi atau sengketa nilai sama saja maknanya dengan mengamini dan mengabsahkan hegemoni penindasan kebebasan yang anti-kodrat. Literatur ilmiah di pelataran disiplin sosiologi dan studi komunikasi organisasi dengan lantang membangun sebuah mufakat intelektual yang merumuskan bahwa esensi perselisihan nilai atau konflik interaksi yang digarap serta dimediasi berdasarkan kerangka parameter argumentasi akal sehat yang proporsional justru berfungsi memprovokasi akselerasi perbaikan ekosistem institusi dan katalisator radikal untuk lompatan daya cipta perubahan progresif di ruang inovasi sosial yang krusial.

Para warga jejaring digital (netizen) yang kedalaman sumur pemahaman kritis literasinya paripurna tidak pernah dimanifestasikan sebagai cermin barisan boneka budak peradaban yang tunduk apolitis dan pasrah secara buta menyerah pada monopoli setiap interpretasi kebijakan produksi negara. Kontras dengan hal tersebut, golongan progresif ini bermutasi fungsi menempati posisi ksatria dalam pilar pengawasan partisipatif proaktif yang menyeimbangkan poros ekuilibrium otoritas (check-and-balance), melancarkan audit konstruktif berkelanjutan yang tidak ditumpangi penumpang gelap. Eskalasi keterlibatan organik dalam atmosfer siber yang diselenggarakan oleh formasi masyarakat yang mumpuni kecerdasannya ini sewaktu membedah anatomi sel-sel kerangka kerja kebijakan negara yang bermuatan kontroversial, dengan telak merangsang

paksaan fungsional (functional duress) kepada aparaturnya dinasti birokrasi pemerintahan untuk beroperasi secara jauh lebih transparan, secara konstan memutakhirkan level mutu legislasi dan meminimalisasi celah inkompetensi administrasi dalam pelayanan publik. Arah mata angin investasi daya juang dari polarisasi konfrontasional murni dirombak dan diubah wujud ke ranah substansial pertukaran argumen validasi empiris komprehensif, menceraut perdebatan murahan yang mendompleng identitas primordial menjadi forum deliberatif tingkat tinggi yang berbasis rasionalitas data dan fakta objektif (Mahardika et al., 2025).

Pada sisi arsitektur operasional lain, perwujudan ekosistem ketahanan komunal harus mensyaratkan dan menyerukan diaktivasinya simpul-simpul partisipasi entitas ekstra-parlementer yang berposisi di luar perimeter tembok tebal pemerintah—meliputi eksistensi tokoh sentral kepemimpinan kearifan lokal adat istiadat, kelompok pelopor cendekiawan dari ranah akademik, figur-figur representasi publik populis, serta jejaring sel pemengaruh di berbagai koridor strata khusus mikrokosmos (micro-influencers). Kombinasi kekuatan dari elemen-elemen simpul vital masyarakat sipil ini ditahbiskan untuk memainkan fungsi kardinal dan fungsional laksana agen mesin peredam guncangan (shock-absorber) dan de-polarisator pereda krisis komprehensif (Hidayat et al., 2025).

Strategi manajemen kepemimpinan dengan manuver relasional kolaboratif partisipatif menyilang kelompok jaringan (network-based structural leadership) inilah yang berperan sangat sentral sebagai injeksi bahan bakar penetral radikalisme demarkasi polarisasi partisan yang menyakitkan di arena panggung siber masyarakat madani. Di hadapan tatanan belantara ekosistem media digital mutakhir yang pada habitat aslinya telah diracuni secara genetik oleh awan mendung kecurigaan tebal dan teror ketidakpercayaan apriori yang akut (a priori distrust environment) menyasar aparaturnya sentralistik negara, sosok relawan yang mawujud dalam postur agen representatif komunitas nonpemerintah ini berdiri secara definitif menunaikan dharma moralnya menjadi fasilitator katalisator penengah perdamaian murni independen (independent functional intermediaries). Untaian bangunan argumentasi jernih dan rasional yang dibunyikan oleh simpul representasi figur-figur moderat di tengah palagan masyarakat sejatinya senantiasa membawa serta probabilitas serapan tingkat penerimaan empiris sosial-kognitif yang jauh lebih superior, membumi, dan resonan, jika hendak dikomparasikan mutlak secara berhadapan-hadapan (head-to-head) dengan dokumen protokoler berupa siaran narasi pers statis (government static press release) cetakan biro kehumasan institusi negara yang kaku. Supremasi dan keunggulan taktis ini dapat dipertanggungjawabkan penyebab asalnya, yang diakibatkan ketiadaan tendensi konspirasi spekulatif masyarakat yang menduga dan menuduh bahwa narasi konstruktif penengah tersebut menggendong benih-benih motif kepentingan politik partisan yang

mendompleng preservasi zona kekuasaan petahana semata (political status quo preservation motive) (Wahid & Martianto, 2026).

Di sisi yang tak kalah penting, analisis sosiologis perihal teknik modifikasi resolusi konflik yang bermanifestasi dan bersemi secara organik di lingkup panggung mikrokosmos internal relung digital sejenis grup-grup diskusi jejaring perpesanan tertutup WhatsApp serta rupa-rupa arena media pesan mini tertutup spesifik lainnya, sama sekali tidak luput dan secara mutlak mengultimatum signifikansinya keharusan formasi metode moderasi nonformal partisipatoris inklusif. Kelahiran fenomena natural dan sporadis ihwal eksistensi figur sang mediator-mediator pendamai fungsional di tataran anatomi akar rumput yang bereinkarnasi mandiri menghidupi ruang-ruang diskusi grup sosial virtual tersebut, menjadi sebuah verifikasi autentik dan testimoni tak terbantahkan atas ketangguhan serta daya keuletan benteng kohesi sosiokultural pertahanan entitas kemasyarakatan (Aliyamsyah Siregar et al., 2025).

Realitas ini memberikan penegasan bahwa tidak selamanya upaya reparasi atas koyaknya tenun sosial akibat infeksi percikan krisis senantiasa mengemis dan mewajibkan intervensi palu godam birokrasi pemerintahan makro raksasa untuk turun gunung mendikte peredaan. Dalam banyak varian insiden dan skala letupan konflik fungsional berkapasitas daya ledak sektoral, tensi pertikaian dan polarisasi warganet sanggup dimentahkan, dilumpuhkan, bahkan dirajut diharmoniskan pemulihannya bertumpu dengan modal serpihan-serpihan kecil interaksi dan injeksi empati mikro komunal—misal implementasi terapi humor pencair suasana, fasilitasi pertukaran dialog lunak nan akrab tanpa hierarki yang egaliter, hingga operasi intervensi taktis moderasi kearifan nilai kebudayaan komprehensif, yang meruntuhkan rintangan, membredel tatanan blok sekat-sekat ideologis, serta mengamputasi sumbu fanatisme dogmatis ego partisan di pusaran semesta virtual komunal tersebut (Solihin et al., 2025).

SIMPULAN

Penelaahan akademis interdisipliner mengenai tata kelola krisis pemerintahan dan manifestasi polarisasi akibat sentimen netizen atas kebijakan publik kontroversial di platform media sosial memberikan konstruksi kesimpulan teoritis dan sintesis empiris ; instrumen dan arsitektur komunikasi kehumasan lembaga pemerintah tidak bisa tidak harus direvolusi, dirombak radikal, serta didekonstruksi total pada tingkat genetis untuk menghadapi gempuran hegemoni dan determinisme peradaban teknologi informasi digital. Respons konservatif arsitektur birokrasi negara yang selama berpuluh dekade membanggakan rutinitas didikte dari satu komando hierarkis melalui pengaplikasian transmisi komunikasi asimetris searah, strategi penyangkalan brutal tanpa rasa simpati pertanggungjawaban moralitas (absolute denial mechanism), dan arogansi modifikasi ancaman manuver jalur hukum absolut tak kenal lelah, telah terbukti usang. Mekanisme artifisial tersebut dapat dipastikan terdiskualifikasi dan kehilangan tajinya untuk

membungkam apalagi meredam ledakan krisis multiplikasi tak terbatas dalam lanskap rimba raya siber yang terhubung, nirbatas kewilayahan, dan bergerak tanpa henti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2024). Strategi Komunikasi Digital Dalam Menciptakan Kerukunan Netizen. *Dakwatul Haq: Journal of Da'wah and Islamic Communication*, 1(1).
- Achfandhy, M. I., Khoirurrijal, K., & Budi, A. (2023). *Kontestasi Wacana Moderasi Beragama di Media Sosial*.
- Aldi, A. F. (2023). *Kekerasan dalam rumah tangga: Studi etnografi virtual dengan pendekatan sentimen analisis twitter terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemi tahun 2020-2022*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Aliyamsyah Siregar, I., Anrial, A., & Valentine, F. (2025). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Kompas. Com dan Metrotvnews. Com dalam Isu Politik Terhadap Polarisasi Pemilih dalam Pemilu 2024 (Edisi Januari 2024)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Amiruddin, L., Rozalinna, G. M., & Anwar, V. L. N. (2022). Banjir Informasi dan Potensi Konflik Horizontal di Tengah Pandemi. *Subjek-Subjek Algoritmik: Perspektif Sosiologi Tentang Dunia Digital-Jejak Pustaka*, 1, 155.
- Aripai, R., & Hilmiyah, M. (2025). Respons Audiens Terhadap Isu-Isu Kontroversial pada Akun Instagram Pinrang_info. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1073–1082.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hidayat, R., Imran, I., & Ramadhan, R. (2025). Peran Media Sosial Dalam Mengkonstruksi Opini Publik Terkait Kebijakan Pemerintah: Studi Kasus Wacana Publik Tahun 2025. *CORE: Journal of Communication Research*, 64–74.
- Irawanto, B., Parahita, G. D., Putra, I. G. N., Anshari, I. N., Sadasri, L. M., Purwaningtyas, M. P. F., Sulhan, M., Kurnia, N., Ahmad, N., & Tania, S. (2024). *Jagat Komunikasi Kontemporer: Ranah, Riset, dan Realitas*. UGM PRESS.
- Judijanto, L., Huda, A. N., Nadila, D., Sutadi, N. F., Septiadi, M. A., Ningrum, D. W. N., Gunawan, S., Sulastri, L., Susanti, S., & Aripin, S. (2026). *Kebijakan Publik di Era Narasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Juditha, C. (2025). The Phenomenon of “Indonesia Gelap” on Social Media: Sentiment Analysis and Public Opinion Polarization. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 157–170.
- Mahardika, D. A., Judijanto, L., Rery, S., Ramadhanita, F. F., Syaputra, D., & Fuadi, M. H. (2025). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Rahman, F. (2025). Demokrasi Digital dan Ujaran Kebencian: Antara Kebebasan Berekspresi dan Represi Politik: Paradoks Ujaran Kebencian dalam Kasus Dhandy. *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 6(3), 259–272.
- Risnanda, R., Setiyowati, D. N., Kusuma, F. A., Manurung, D. R., & Sulaksono, T. (2025). Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Opini Publik terhadap Hukum: Studi Kasus Pengeroyokan Oknum BEM di FKIP. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 963–969.
- Setiawan, A. P., Alby, J. D. A. H., & Azhar, S. R. A. (2024). Mitigasi Ekosistem Politik Destruktif: Upaya Generasi Muda dalam Mengatasi Polarisasi Politik Berbasis Media Digital. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(2), 117–132.
- Solihin, O., Widiono, S., & Evanne, L. (2025). Komunikasi Kesehatan Dalam Isu Kebijakan Publik: Analisis Tayangan Youtube’Polemik Aturan BPJS 2025. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 13(2), 164–180.
- Sumartias, S., Brumadyadisty, G., & Sufa, S. A. (2026). *Fans Politik, Bukan Pemilih*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Wahid, U., & Martianto, R. W. U. (2026). *Polarisasi, Algoritma TikTok, dan Kesehatan Mental Politik*. Indigo Media.